

Penguatan Relawan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Subang

Herry Hermawan

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10270

*Email Korespondensi: herry.hermawan1961@gmail.com

Abstract - This Community Service (PkM) activity aims to strengthen the institutional capacity of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Subang Regency, particularly in formulating and implementing effective communication strategies. The challenges faced by Bawaslu Subang Regency often relate to information dissemination, regulation socialization, and mobilizing community participation in supervision, which depend on communication effectiveness. The PkM method utilized was presentations and discussions, focusing on communication needs analysis, key message design (including violation prevention issues and the use of digital platforms and social media). The training was held on September 15, 2025, at the Laska Hotel, Subang Regency. The results of this activity indicate an increase in participants' understanding of managing public communication. Participants gained the ability to recognize and comprehend better communication techniques, which will serve as a key indicator in increasing active public participation in election supervision in Subang Regency. The recommendation from this activity is the need for Bawaslu Subang Regency to internalize the communication function as a strategic instrument for building public trust and institutional authority within the context of election supervision. This PkM activity is expected to make a contribution to the operational effectiveness of Bawaslu Subang Regency in realizing honest and fair elections.

Keywords: Strengthening; Bawaslu; Communication; Supervision.

Abstrak – Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Subang, dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif. Tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Subang seringkali berkaitan dengan diseminasi informasi, sosialisasi regulasi, serta mobilisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Metode PkM yang digunakan adalah paparan dan diskusi dengan fokus pada analisis kebutuhan komunikasi, perancangan pesan kunci, pemanfaatan platform digital dan media sosial. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025, di Hotel Laska Kabupaten Subang. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dalam mengelola komunikasi publik. Peserta memperoleh kemampuan untuk mengetahui dan memahami teknik berkomunikasi yang lebih baik, yang akan menjadi indikator kunci dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Subang. Rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah perlunya Bawaslu Kabupaten Subang menginternalisasi fungsi komunikasi sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik dan otoritas kelembagaan dalam konteks pengawasan Pemilu. Kegiatan PkM ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten Subang dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

Kata Kunci: Penguatan; Bawaslu; Komunikasi; Pengawasan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Proses ini tidak hanya menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, tetapi juga mensyaratkan adanya penyelenggaraan yang bersih, jujur, dan adil. Untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut terlaksana, peran lembaga pengawas Pemilu menjadi sangat vital sebagai garda terdepan dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran.

Konsepsi tentang perlunya Pemilu dilandaskan pada pemikiran, Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat, sehingga pemerintahan harus mendapatkan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya (Islam & Agung, 2024). Legitimasi tersebut hanya dapat diperoleh dari proses Pemilihan Umum yang kompetitif, jujur, dan adil (demokratis) (Putra Disantara et al., 2023). Tentu saja pemilihan umum sebagai alat untuk memilih wakil rakyat tidak hanya fokus pada peran kandidat dalam melaksanakan kampanye atau pendidikan politik dengan bebas untuk mendapat dukungan dari rakyat, tetapi fokus juga pada peranan lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam konteks hukum Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah secara kelembagaan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota sifat yang permanen dan mandiri (Rinaldo, 2017). Penguatan ini mencakup perluasan kewenangan, mulai dari pengawasan seluruh tahapan Pemilu, penanganan laporan/temuan pelanggaran, hingga kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Hal ini menegaskan bahwa Bawaslu tidak lagi sekadar lembaga pemberi rekomendasi, tetapi telah berevolusi menjadi lembaga yang memiliki fungsi semacam peradilan (Asmak Ui Hosna, Nadia Berliana, 2024).

Namun, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengawas di daerah, termasuk di Bawaslu Kabupaten Subang, tidaklah sederhana. Kabupaten Subang sebagai salah satu wilayah dengan dinamika politik yang khas, membutuhkan pengawas Pemilu yang benar-benar kuat, solid, dan berintegritas untuk menghadapi berbagai potensi pelanggaran, seperti politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), hingga sengketa proses Pemilu. Oleh karena itu, kegiatan mengenai penguatan kelembagaan pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Subang menjadi mendesak. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Subang menjadi sebuah keniscayaan. Penguatan ini tidak hanya berfokus pada aspek legalistik dan struktural, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas. Salah satu wujudnya dituangkan ke dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berkaitan dengan strategi berkomunikasi dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Memang telah banyak kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berkenaan dengan pengawasan partisipatif Pemilu. Salah satu contohnya yaitu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh Hidayat dan Lestari (Batam, 2024). Materi yang diberikan lebih menekankan kepada aspek legal. Kegiatan lain dilakukan oleh Bunda dkk. (Di & Rambah, 2025). Dalam pengabdian ini Bunda dkk. menekankan kepada aspek praktis, seperti melakukan simulasi pengawasan, sedangkan Bawaslu Kabupaten Pemalang (2024) melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa penyuluhan tentang pengawasan Pemilu kepada para Buruh Petik PTP Semugih Moga (Brigjen et al., n.d.). Berbeda dengan ketiganya, Pengabdian kepada Masyarakat yang peneliti lakukan menekankan kepada peningkatan kualitas para relawan pengawas Pemilu, melalui pembekalan cara berkomunikasi yang efektif.

Cara berkomunikasi yang efektif (sebagai salah satu strategi komunikasi) merupakan sebuah proses sosial didasarkan pada dialog melalui teknik-teknik dan alat-alat yang luas.

Strategi komunikasi merupakan rencana mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan perangkat verbal dan non-verbal (Sari & Ali, 2021). Sebuah strategi komunikasi yang dikerjakan dengan baik, dapat menjadi sebuah kekuatan perubahan. Oleh sebab itu, komunikasi memainkan peranan yang sangat penting karena ia dapat menjadi pembuka jalan untuk memahami dasar-dasar strategi komunikasi (Hermawan & Nilamsari, 2023).

Menurut Ojenike (Ojenike et al., 2014), peranan mendasar dari strategi komunikasi yang efektif yaitu menuntun orang-orang untuk menyadari sepenuhnya terhadap kebutuhan, situasi dan pilihan yang sesuai untuk perubahan. Dengan demikian antusiasme para peserta terhadap pelatihan ini dapat menyadarkan para komisioner Bawaslu Kabupaten Subang terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Selaras dengan pernyataan Olajide (Olajide, 2016) yang menyatakan, sebuah strategi komunikasi yang dikerjakan dengan baik, dapat menjadi sebuah kekuatan perubahan. Dengan demikian, para komisioner Bawaslu Kabupaten Subang dapat mendorong terciptanya kedewasaan berpolitik masyarakat, sehingga proses pemilihan umum dapat dilaksanakan secara bebas, jujur, adil dan terbuka (Ningsih, 2023). Karena penggunaan cara-cara kekerasan dan curang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, sekalipun itu dilakukan demi demokrasi (Muhammad et al., 2023). Demokrasi hanya dapat dibangun dengan cara-cara yang beradab, agar fondasinya menjadi kuat dan tahan dari segala goncangan. (Federman, 2017)

Penguatan kelembagaan ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas dan kewenangan semata, melainkan juga mencakup penguatan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, sistem pencegahan yang efektif, serta sinergi dengan berbagai pihak seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan media. Mengingat pentingnya peran Bawaslu Kabupaten Subang dalam menjamin Pemilu yang demokratis dan berintegritas di tingkat lokal, kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi sejauh mana upaya penguatan kelembagaan telah dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi kinerja pengawasan demi tercapainya Pemilu yang bersih dan terpercaya di Kabupaten Subang. Dengan demikian kualitas pelayanan publik terhadap publik pun dapat ditingkatkan, selaras dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin baik sehingga mampu merespon setiap penyimpangan dalam pelayanan publik (Saifulloh et al., 2022).

Tujuan kegiatan ini agar peserta memahami strategi berkomunikasi yang efektif, dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif tidak sekedar mengirimkan informasi, tetapi juga harus bersifat timbal balik, terbuka terhadap setiap pertukaran dan umpan balik. Komunikasi yang efektif merupakan fungsi dan bukti dari institusi yang baik. Peranan mendasar dari strategi komunikasi yang efektif yaitu menuntun orang-orang untuk menyadari sepenuhnya terhadap kebutuhan, situasi dan pilihan yang sesuai untuk perubahan. (Ojenike et al., 2014)

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan ini adalah: (1) mengedukasi peserta untuk berpikir kritis terhadap informasi yang diterima; (2) membantu pihak-pihak terkait (KPU daerah dan Bawaslu) dalam merumuskan strategi komunikasi yang efektif saat terjadi krisis pasca-Pilkada; (3) mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi resmi; (4) bagi Ilmu Komunikasi, program ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dengan menjadi objek studi empiris untuk menguji dan mengembangkan teori-teori tentang persuasi, manajemen konflik, komunikasi politik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PkM berupa *Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Subang* ini dilakukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Tanggal 15 September 2025, bertempat di Hotel Laska Subang, dengan tema *Evaluasi Penyelenggaraan*

Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Subang dalam Proyeksi langkah Strategis Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa yang belajar dan/atau berdomisili di Kabupaten Subang, sebagai relawan pengawas Pemilu. Diharapkan setelah mengikuti pembinaan ini mereka akan menyadari tentang pentingnya memiliki keterampilan berkomunikasi sehingga, selain dapat melakukan pengawasan secara efektif, mereka juga dapat menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

PkM ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dengan peserta. Peserta mendapat paparan tentang teknik berkomunikasi yang efektif untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan Pemilu. Materi yang diberikan pada pelatihan yaitu pengetahuan tentang partisipasi dan komunikasi, konsep dasar peningkatan partisipasi masyarakat, menyimak aktif, komunikasi teurapeutik, dan mengelola emosi dalam situasi konflik.

Tabel 1. Materi Paparan

Topik	Kompetensi	Tujuan	Relevansi
Partisipasi dan komunikasi	Keterampilan Komunikasi	Peserta dapat memperdalam pemahaman mereka tentang konsep, isu, atau materi tertentu melalui pertukaran ide dan sudut pandang.	Keterampilan berpartisipasi dan berkomunikasi adalah fondasi bagi kemampuan untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik dalam kehidupan sosial yang beragam, mempromosikan masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri
Konsep dasar peningkatan partisipasi masyarakat	Pengetahuan (Kognitif)	Mendorong adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama (kohesi sosial) di antara peserta terhadap keberhasilan program atau kebijakan melalui keterlibatan masyarakat.	Ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, mereka akan mempunyai rasa memiliki (<i>sense of ownership</i>) yang tinggi.
Menyimak aktif	Empati	Membekali peserta dengan keterampilan praktis untuk memperbaiki cara mereka berinteraksi sehari-hari, baik dalam konteks profesional maupun pribadi.	Memungkinkan individu atau tim untuk mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya (bukan hanya gejala) dengan mendengarkan semua sisi cerita secara cermat sebelum mengusulkan solusi.
Komunikasi teurapeutik	Hubungan Saling Percaya	Mendorong peserta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam berkomunikasi serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik.	Mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi individu untuk berbagi pengalaman pribadi dan emosi yang rentan.
Mengelola emosi dalam situasi konflik	Kesadaran Diri	Peserta memahami peran penting kecerdasan emosional dalam dinamika konflik dan bagaimana emosi yang tidak dikelola dapat memperburuk situasi.	Kemampuan mengelola emosi dalam konflik secara langsung berkorelasi dengan kesehatan mental (mengurangi stres dan frustrasi) dan kesuksesan hubungan (mempertahankan ikatan baik).

Hasil kegiatan PkM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan
2. Ketercapaian tujuan pelatihan
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 30 orang sesuai dengan jumlah perwakilan Divisi Humas dan Staf Kehumasan Bawaslu Kabupaten Subang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 0 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil.

Ketercapaian tujuan paparan secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi dapat disampaikan secara rinci. Akibatnya kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang. Namun dilihat dari antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta, maka dapat disimpulkan, tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

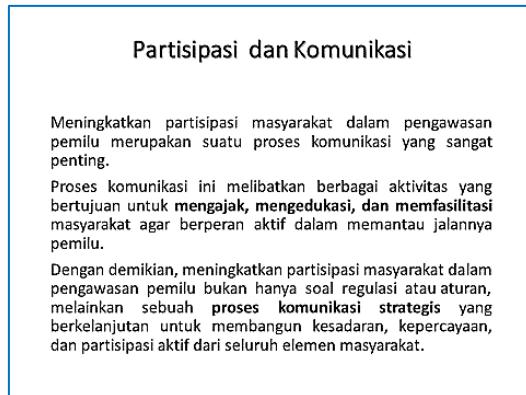
Kegiatan PkM ini dilakukan dalam satu sesi. Pada sesi ini, para peserta dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Alasannya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan kunci untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Jika masyarakat mau berpartisipasi, kecurangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi pemilih bisa dicegah.

Pembahasan berlanjut kepada strategi komunikasi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, yang menjadi topik pada paparan ini (Gambar 1). Proses komunikasi ini melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengajak, mengedukasi, dan memfasilitasi masyarakat agar berperan aktif dalam memantau jalannya pemilu. Strategi ini penting diketahui oleh para peserta karena merupakan tahapan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Tujuannya untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil.



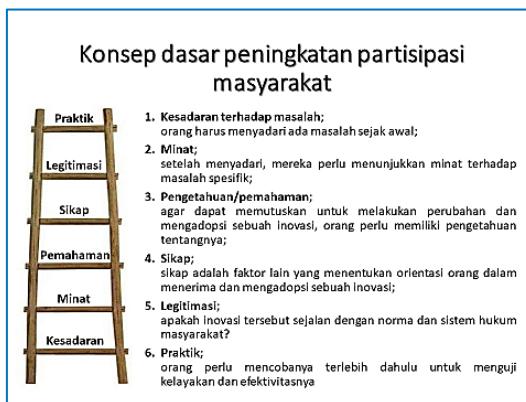
Gambar 1. Topik Presentasi (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan suatu proses komunikasi yang sangat penting. Dengan demikian komunikasi yang bersifat persuasif untuk mengajak, mengedukasi, dan memfasilitasi masyarakat agar berperan aktif dalam memantau jalannya pemilu, sehingga masyarakat sadar dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu (Gambar 2).



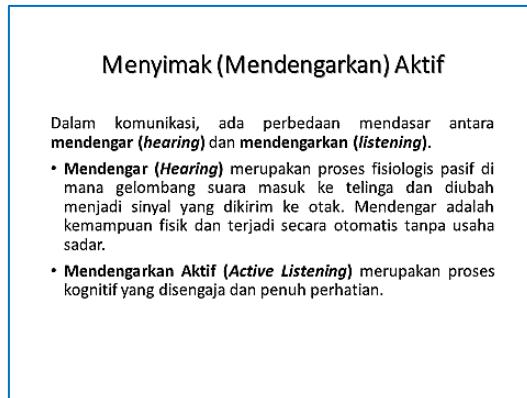
Gambar 2. Partisipasi dan Komunikasi (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Dalam menjalankan strategi komunikasi ini, ada 6 (enam) konsep dasar yang harus dijadikan landasan (Gambar 3). Pertama, kesadaran terhadap masalah. Di sini orang harus menyadari ada masalah sejak awal. Kedua, minat. Setelah menyadari, mereka perlu menunjukkan minat terhadap masalah spesifik. Ketiga, pengetahuan/pemahaman. Agar dapat memutuskan untuk melakukan perubahan dan mengadopsi sebuah inovasi, orang perlu memiliki pengetahuan tentangnya. Keempat, sikap yang merupakan faktor lain yang menentukan orientasi orang dalam menerima dan mengadopsi sebuah inovasi. Kelima, legitimasi. Di sini dicari tahu apakah inovasi tersebut sejalan dengan norma dan sistem hukum masyarakat? Keenam, praktik, dalam arti orang perlu mencobanya terlebih dahulu untuk menguji kelayakan dan efektivitasnya



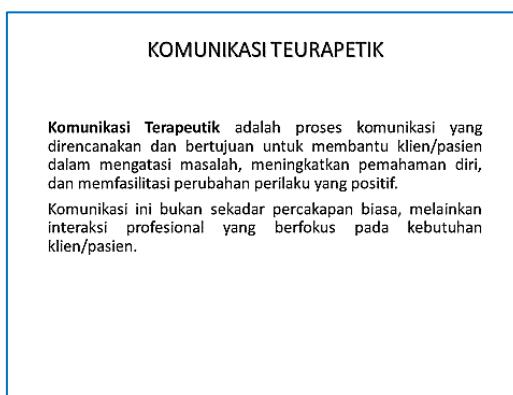
Gambar 3. Konsep Dasar Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Penyampaian pesan, apa pun bentuknya, hanya akan efektif jika penerima pesan menyimak aktif. Oleh karena itu papara tentang menyimak pun diberikan sebagai pengetahuan dasar (Gambar 4). Dalam poin ini dijelaskan bagaimana menjadi penyimak aktif, faktor apa saja yang harus dihindari dan/atau dilakukan untuk menjadi penyimak aktif.



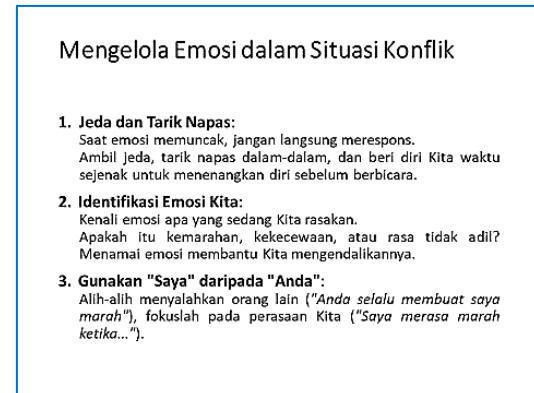
Gambar 4. Menyimak (Mendengarkan) Aktif (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Selain menyimak aktif, paparan juga dilengkapi dengan materi tentang komunikasi teurapeutik (Gambar 5). Materi ini diperlukan sebagai bekal para petugas pengawas di lapangan. Hal ini diberikan sebagai langkah antisipatif, mengingat tugas relawan pengawas Pemilu tidak hanya mengawasi (melihat dan mencatat), tetapi juga akan berhadapan dengan para *stakeholder* Pemilu.



Gambar 5. Komunikasi Teurapeutik (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Matyeri lain yang dirasa perlu dimiliki oleh para relawan pengawas Pemilu, yaitu pengelolaan emosi, terutama dalam situasi konflik (Gambar 6). Hal ini dip[erlukan karena sering terjadi salah satu paslon dan/atau para pendukung paslon tertentu merasa tidak puas, sehingga tidak jarang melakukan hal-hal yang bersifat provokatif. Ada 5 (lima) poin yang harus dilakukan dalam mengelola emosi, yaitu (1) jeda dan Tarik nafas, (2) mengidentifikasi emosi kita, (3) gunakan "Saya" daripada "Anda", (4) dengarkan secara empatis, dan (5) Fokus pada Tujuan Bersama.



Gambar 6. Mengelola Emosi dalam Situasi Konflik (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme peserta dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Setelah mengikuti paparan, peserta menyadari tentang pentingnya memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif.

Hasil kegiatan PkM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan.
2. Ketercapaian tujuan pelatihan.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 40 orang sesuai dengan jumlah peserta yang terdiri dari para mahasiswa yang berdomisili dan/atau berkuliah di Kabupaten Subang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 34 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan target peserta kurang dari 100%. Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan kegiatan PkM, jika dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti, dapat dikatakan berhasil karena jumlah peserta yang hadir 85% dari yang ditargetkan.

Dari sisi pemahaman, peserta dapat dikatakan masih belum berhasil. Salah satu indikatornya, hanya beberapa peserta yang merespons informasi yang telah diterima, misalnya dalam bentuk tanya jawab, sehingga sulit diduga mengenai pemahaman peserta secara keseluruhan. Pengetahuan yang diperoleh merujuk pada pemahaman kognitif peserta terhadap fakta, konsep, dan informasi relevan lainnya yang disampaikan selama paparan. Pemahaman kognitif ini merupakan domain intelektual yang berfokus pada apa yang peserta ketahui atau pahami setelah sesi pembelajaran. Pengetahuan bersifat informasional dan seringkali menjadi fondasi awal sebelum keterampilan atau sikap dapat berubah. Hal ini bisa jadi dikarenakan oleh beberapa faktor seperti:

1. Waktu pelatihan yang singkat mungkin tidak cukup untuk membahas seluruh materi secara mendalam atau memberikan kesempatan praktik yang memadai.
2. Materi yang terlalu umum atau tidak spesifik pada kasus-kasus aktual di daerah tertentu mungkin kurang relevan bagi semua peserta.
3. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman awal peserta dapat menyulitkan penyampaian materi yang sesuai untuk semua.
4. Adanya peserta yang kurang aktif atau enggan berinteraksi selama sesi pelatihan.
5. Adanya gangguan dari pekerjaan rutin atau faktor eksternal lainnya yang mengurangi fokus peserta.
6. Tidak adanya mekanisme monitoring atau pendampingan pasca-pelatihan untuk memastikan penerapan materi di lapangan.

Tetapi ketercapaian target materi pada kegiatan PkM ini cukup baik, karena materinya dapat disampaikan secara keseluruhan. Adapun manfaat yang diperoleh oleh para peserta yaitu mereka dapat mengetahui, memahami dan menerapkan teknik berkomunikasi yang lebih baik dan diharapkan kualitas tersebut dapat dipakai sebagai poin dalam mengerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten Subang.



Gambar 7. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu (Sumber: Bawaslu Subang)

SIMPULAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mendapat pengetahuan tentang komunikasi, partisipasi, komunikasi teurapetik, mengelola emosi dan strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan ini, yang ditunjukkan dengan keaktifan mereka, seperti bertanya dan/atau menyampaikan gagasan.

SARAN

Pelatihan ini tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kapasitas, tetapi juga berfungsi sebagai *platform* vital untuk refleksi kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi. Oleh sebab itu, di masa mendatang, dalam penguatan relawan pengawas pemilu di Bawaslu Kabupaten Subang, penting untuk didukung oleh *studi empiris* tentang dampak langsung pelatihan ini terhadap penurunan atau penaikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Selain itu *penelitian komparatif* mengenai model-model strategi komunikasi yang dapat diadopsi atau dimodifikasi untuk konteks Indonesia, juga perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmak Ui Hosna, Nadia Berliana, A. P. W. (2024). Jurnal Prisma Hukum. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(1), 30–36. file:///C:/Users/HP/Downloads/98-105.pdf
- Batam, A. T. S. (2024). *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Volume 1 , Nomor 4 , November 2023 ISSN : 2986-7819 SOCIALIZATION OF PARTICIPATORY SUPERVISION FOR STUDENTS*. 1(November 2023), 855–860.
- Brigjen, J., No, K., & Email, P. (n.d.). *Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan masyarakat marginal*. 15.
- Di, P., & Rambah, S. (2025). *SOSIALISASI PENDIDIKAN DEMOKRASI TERKAIT*

- PENGAWASAN. 5(140), 4–8.
- Federman, S. (2017). Narrative Approaches to Understanding and Responding to Conflict. *The International Journal of Conflict Engagement and Resolution*, 4(2), 154–171. <https://doi.org/10.5553/ijcer/221199652016004002002>
- Hermawan, H., & Nilamsari, N. (2023). *Pelatihan Strategi Yang Efektif Dalam Mengomunikasikan Program Keterbukaan Informasi Publik*. 3(2), 40–45.
- Islam, U., & Agung, S. (2024). *PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 PELAKSANAAN PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017*. 7.
- Muhamad, A., Sinaulan, R. L., & Khalimi, K. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4667–4676. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>
- Ningsih, S. (2023). Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum* ..., 23(2), 57–66. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/32974>
- Ojenike, B., Adedokun, S., Odunsi, A., & Ojenike, J. (2014). Challenges of Communication Strategies for Sustainable National Development in Nigeria. *Journal of Media and Communication Studies*, 6(3), 43–47. <https://doi.org/10.5897/jmcs2014.0383>
- Olajide, B. R. (2016). Development communication for rural development: Issues for consideration. *Rural Development and Household Livelihood*, February, 81–94. https://www.researchgate.net/profile/Olanrewaju-Olaniyan/publication/344959326_Rural_Development_and_Household_Livelihood_Rural_Development_and_Household_Livelihood/links/5f9b39d1458515b7cfa950cb/Rural-Development-and-Household-Livelihood-Rural-Developmen
- Putra Disantara, F., Firdausi, F., Suharyanto, D., & Serang Raya, U. (2023). *HUKUM PEMILU DI INDONESIA Fuqoha Fuqoha* (Issue May). <https://www.researchgate.net/publication/372553118>
- Rinaldo, E. P. (2017). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 473–488. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.788>
- Saifulloh, M., Rezeky, R., & Lumban, M. (2022). *Komunikasi Pelayanan Publik Kepolisian Polda Banten Melalui Program Training of Trainer (ToT)*. 2(2), 33–41.
- Sari, Y., & Ali, D. (2021). Strategi komunikasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam membangun citra positif. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–8.